YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4874

ADVOKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG

Advocacy of the Environmental Agency to Increase Community Participation in Waste Management in Padang City

Nadira Sepvani & M. Fachri Adnan
Universitas Negeri Padang
nadirasepvani20@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 1, 2025	Jan 15, 2025	Jan 28, 2025	Feb 2, 2025

Abstract

This research explains the environmental agency's advocacy to increase community participation in waste management in Padang City as well as the factors inhibiting the environmental agency's advocacy to increase community participation in waste management in Padang City. This study uses a qualitative descriptive methodology. Observations, interviews and documentation studies were used to collect data. Participants selected using purposive sampling included employees from the Padang City Environmental Service, Waste Bank Managers, and the community. To ensure the validity of this research data, source triangulation and method triangulation methods were used, and interactive models were used to analyze the data. The results of the research show that the environmental department has not done much to encourage people to become more involved in waste management in Padang City. Implementation of environmental policy advocacy to increase community participation in waste management aims to build awareness, change behavior and create policies that support effective waste management. Implementation of

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

environmental policy advocacy uses various strategies, including educational outreach, formation of waste banks, collaboration with stakeholders, use of social media and mass media. The inhibiting factors for advocacy in increasing community participation in waste management in Padang City are lack of public awareness and knowledge, limited infrastructure and facilities, limited budget.

Keywords: Advocacy, Community Participation, Waste Management

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan advokasi dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang serta faktor penghambat advokasi dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Partisipan yang dipilih secara purposive sampling termasuk pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Pengelola Bank Sampah, dan masyarakat. Untuk memastikan validitas data penelitian ini, metode trianggulasi sumber dan trianggulasi metode digunakan, dan model interaktif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup belum melakukan banyak hal untuk mendorong orang untuk lebih terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Pelaksanaan advokasi kebijakan lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Pelaksanaan Advokasi kebijakan lingkungan menggunakan berbagai strategi, di antaranya penyuluhan edukasi, pembentukan bank sampah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Pemanfaatan media sosial dan media massa. Adapun faktor penghambat advokasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang yaitu kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas, Anggaran yang Terbatas.

Kata Kunci: Advokasi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Satu masalah yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia, terutama di kota-kota, adalah sampah. Karena masalah sampah terkait dengan pola hidup dan kebudayaan masyarakat, penting untuk menyadari bahwa sampah sekarang menjadi masalah yang sangat aktual di Indonesia, terutama mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, berdampak pada volume sampah yang diproduksi setiap tahunnya. (Iken et al., n.d.)

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dari 640 ton sampah total yang dihasilkan sekitar 500 ton per hari di Padang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Air Dingin. Sekitar 140 ton sampah lainnya tidak diangkut ke TPA Air Dingin; beberapa mungkin diambil oleh pemulung untuk dikirim ke pusat daur ulang (Muzaqi & Ambulanto, 2020). Untuk menangani masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

memutuskan untuk mengambil alih masalah ini. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendorong orang untuk mengubah cara mereka mengelola sampah sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat. Advokasi adalah proses yang terus-menerus dan fleksibel untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan menyusun informasi menjadi perdebatan yang akan dikomunikasikan antarpribadi dengan dan melalui berbagai media dengan tujuan meningkatkan sumber daya atau memperoleh dukungan dari pemimpin politik dan sosial untuk pengembangan program, sehingga membuat masyarakat siap untuk menerimanya (Zainal, 2018).

Pelaksanaan advokasi yang masih rendah dapat berdampak pada kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap suatu program, termasuk dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Dimulai dengan kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan kondisi lingkungan yang buruk di Indonesia, serta kegagalan pemerintah untuk melindungi sumber daya alam, advokasi lingkungan hidup muncul (Ungusari, 2015). Ketika advokasi tidak berjalan secara optimal, masyarakat cenderung tidak memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya aturan yang diterapkan, sehingga program yang dibuat tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam perilaku mereka.

Salah satu penyebab rendahnya pelaksanaan advokasi bisa berasal dari kurangnya strategi komunikasi yang efektif. Pesan yang ingin disampaikan tentang kebijakan tidak akan terserap dengan baik jika disampaikan dengan jelas dan menarik bagi masyarakat. Misalnya, jika sosialisasi hanya dilakukan secara formal melalui peraturan tertulis tanpa adanya pendekatan langsung ke masyarakat, maka efektivitasnya akan sangat terbatas. Sebaliknya, jika pendekatan dilakukan dengan metode yang lebih interaktif seperti diskusi, kampanye kreatif, atau melalui tokoh masyarakat, maka peluang keberhasilannya lebih besar.

Penelitian mengenai advokasi lingkungan hidup juga dilakukan oleh (Absori, 2017) yang menjelaskan bahwa advokasi masyarakat dibantu oleh lembaga swadaya. Upaya advokasi ini dilakukan dalam kolaborasi dengan masyarakat dan dimulai dengan percakapan tentang masalah pencemaran lingkungan. Di samping itu, mereka berusaha membantu masyarakat berpikir tentang masalah mereka dan mencari solusi. Setelah itu, mereka berkumpul untuk melakukan tindakan bersama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui pelatihan advokasi lingkungan dapat berjalan dengan baik dengan adanya bantuan dari berbagai pihak.

Penelitian lainnya mengenai Advokasi juga dilakukan oleh (Iken et al., n.d.), advokasi adalah upaya yang terorganisir dan sistematis dengan tujuan mempengaruhi dan mendorong perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Dengan demikian, advokasi lebih upaya untuk perubahan sosial melalui semua alat dan saluran demokrasi, termasuk proses politik dan hukum yang ada dalam sistem demokrasi yang berlaku di seluruh negara.

Advokasi juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak buruk dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Menurut Iskandar (2010:62) mencatat bahwa advokasi lingkungan diperlukan untuk membela hak-hak masyarakat yang terancam oleh praktik-praktik pengelolaan sampah yang merugikan, seperti pembuangan limbah ilegal atau pembakaran sampah yang mencemari udara. Dengan demikian, advokasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan kerusakan yang semakin besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, serta sebagai akibat dari kegagalan pemerintah dalam melindungi sumber daya alam, advokasi lingkungan hidup muncul. (Hadi, 2023). Karena itu, masalah di atas menunjukkan bahwa advokasi dinas lingkungan hidup masih adanya kendala dengan indikasi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama melalui inisiatif seperti bank sampah dan sosialisasi edukatif. Namun, terdapat beberapa tantangan utama yaitu Keterbatasan sumber daya dan tenaga penyuluh, belum meratanya pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Kota Padang, kesinambungan program memerlukan dukungan kebijakan dan komitmen yang lebih kuat dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan advokasi dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Oleh Karena itu, peneliti bermaksud membuat artikel yang berjudul "Advokasi Dinas Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Padang"

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk membuat bahasan penelitian lebih jelas dengan melakukan pengamatan langsung dan mendalam. Selain itu, informasi yang dikumpulkan mengenai

advokasi dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang lebih terperinci. Lokasi Penelitian ini bertempatkan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang berada di Jalan Simpang Rambutan, Gunungsarik, Kecamata Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Penetapan lokasi ini menjadi tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, karena dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah diperlukan advokasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Penelitian ini dilakukan selama 5 kali pertemuan awal penelitian dari bulan oktober 2024. Sehingga data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan mendengarkan pandangan dan pemahaman dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tentang Advokasi Dinas Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Padang. Metode purposive sampling digunakan untuk memilih informan. Penelitian ini melibatkan Kepala Bidang Komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kepala Seksi Bidang Komunikasi dan Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kepala Bank Sampah Panca Daya, dan anggota dan komunitas yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL

Pelaksanaan advokasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur kewajiban serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam perda ini, advokasi berperan sebagai upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan, meningkatkan kesadaran, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menjalankan advokasi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pelatihan tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi ini difokuskan pada pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah, manfaat bank sampah, serta dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk. Dinas Lingkungan Hidup juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyampaikan pesan lingkungan kepada masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini masih rendah.

Narasumber menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata, serta keterbatasan waktu masyarakat untuk menghadiri sosialisasi karena kesibukan pekerjaan. Selain itu, ada juga kendala dalam bentuk kurangnya tenaga penyuluh lingkungan yang memadai dan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan advokasi secara lebih luas.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, tetapi masih ada beberapa hambatan yang menghambatnya. Akibatnya, keterlibatan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, ditemukan bahwa program advokasi yang telah dijalankan oleh pemerintah sudah mencakup berbagai aspek seperti sosialisasi, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun, efektivitas program-program ini masih belum optimal dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah dengan benar.

Berdasarkan hasil penelitian meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah, masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan kurang peduli terhadap dampak lingkungan dari perilaku mereka. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sering kali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak warga yang masih belum mendapatkan informasi yang memadai tentang peraturan dan tata cara pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, tingkat literasi lingkungan yang masih rendah di beberapa kelompok masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis akan menjelaskan metrik keberhasilan advokasi dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah:

Indikator Input

Semua yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan indikator input yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, serta kebijakan atau peraturan perundang-undangan. (Ummah, 2019). Adapun strategi pelaksanaan advokasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain, sebagai berikut:

1. Advokasi Kerja Sama

Dalam pelaksanaan advokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terdapatnya advokasi kerjasama yang memahami bahwa keberhasilan advokasi kebijakan lingkungan memerlukan dukungan dari berbagai pihak apabila tidak ada kerjasama dari beberapa pihak maka program tidak berjalan dengan baik (Ekonomi et al., 2023). Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Advokasi melalui kerja sama merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk melibatkan berbagai pihak dalam mendukung program-program (Claudia, 2021) yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih tergolong rendah. Dalam konteks ini, kerja sama dilakukan dengan membangun kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi pendidikan, serta media massa, guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi aktif masyarakat. Kerja sama ini juga harus berorientasi pada kesinambungan. Setelah program sosialisasi dan edukasi diterapkan, evaluasi berkala perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar program dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kesulitan masyarakat. Dengan demikian, advokasi kerja sama dalam pengelolaan sampah bukan hanya sekadar mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung perubahan perilaku secara berkelanjutan.

2. Advokasi Melalui Pengawasan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga menjalankan pengawasan terhadap implementasi pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat monitoring Program Pengelolaan Sampah Mengawasi efektivitas program-program seperti bank sampah dan TPS 3R untuk memastikan operasional berjalan sesuai rencana. evaluasi perilaku masyarakat Dinas memantau perubahan pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan melakukan pemilahan, termasuk menindaklanjuti laporan warga terkait pelanggaran. Penerapan Sanksi dan Insentif Mengawasi penerapan peraturan daerah (Perda) tentang larangan membuang sampah sembarangan. Sanksi seperti denda diterapkan untuk meningkatkan disiplin, sementara insentif seperti pengurangan biaya retribusi diberikan bagi warga yang aktif berpartisipasi. Pemantauan Keberlanjutan Program Dinas memastikan agar program advokasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi budaya yang terus berjalan. Hal ini dilakukan melalui evaluasi rutin dan penyempurnaan kebijakan.

Bahwa advokasi melalui pengawasan tidak hanya mengandalkan tindakan pencegahan dan penegakan hukum, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memahami bahwa keberhasilan advokasi lingkungan memerlukan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, bekerja sama dengan pemangku kepentingan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Indikator Proses

Kecepatan, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan adalah indikator proses (Ummah, 2019). Untuk mendukung kegiatan pengurangan sampah, sosialisasi dan edukasi dilakukan. Ini disampaikan dalam surat edaran dan himbauan yang dikeluarkan oleh walikota Padang. Himbauan diberikan untuk membatasi penggunaan plastik, memastikan hidangan rapat tidak memiliki kemasan plastik, dan membatasi penggunaan botol minuman berulang pakai. Adapun pelaksanaan kegiatan advokasi dinas lingkungan hidup kota padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu penyuluhan dan edukasi serta pemanfaatan media sosial sebagai berikut :

1. Penyuluhan dan Edukasi

Penyuluhan dan edukasi menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Kegiatan edukasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat (Lubis, Meilani, Yuniarti, & Dalimunthe, 2019). Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melaksanakan penyuluhan dengan metode tatap muka maupun daring, yang melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan, RT, dan RW (Setyadiharja, 2018)Penyuluhan dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat di tingkat kelurahan, RT, dan RW dalam penyuluhan ini sedikitnya masyarakat yang enggan mengikuti penyuluhan tesebut dikarenankan daya tarik masyarakat yang masih rendah.

Gambar 1 Penyuluhan Pengelolaan Sampah di SMA Negeri 1 Padang

Selanjutnya pada Senin, 11 November 2024 Kegiatan penyuluhan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Kampanye tentang pengelolaan sampah di sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya mempertahankan lingkungan.

Tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi keberhasilan kampanye kami diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan jumlah partisipan dalam kegiatan bank sampah, peningkatan kesadaran masyarakat yang kami evaluasi melalui survei, serta jumlah interaksi dan keterlibatan di media sosial.Kami akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk melanjutkan kampanye ini. Selain itu, kami juga berencana membuat program pelatihan untuk relawan agar mereka bisa menjadi duta lingkungan di komunitas masing-masing

Bahwa penyuluhan pengelolaan sampah di sekolah adalah upaya terorganisir untuk menyampaikan pesan kepada siswa, guru, dan komunitas sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik adapun tantangan dalam kampanye kurang kesadaran dari masyarakat dalam lingkungan ini(Studi, Ilmu, Universitas, & Padang, 2024).

2. Pemanfaatan Media Sosial dan Media Massa

Dalam era digital, media sosial dan media massa menjadi alat strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk menyampaikan pesan advokasi kebijakan lingkungan. Pemanfaatan kedua media ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat lebih luas, meningkatkan kesadaran publik, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan. Advokasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dinas Lingkungan Hidup, Facebook, dan YouTube. Selain itu, media massa seperti radio dan surat kabar lokal digunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan sampah. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk menjangkau generasi muda dan menyampaikan pesan advokasi dengan cara yang menarik secara keseluruhan, pemanfaatan media sosial dan media massa untuk orang yang tidak memiliki ponsel dalam menyampaikan pesan advokasi kebijakan lingkungan harus tetap didasarkan pada prinsip inklusivitas dan aksesibilitas. Penggunaan berbagai media dan metode komunikasi yang adaptif dan menyeluruh dapat membantu memastikan pesan sampai ke semua lapisan masyarakat, termasuk yang tidak terhubung dengan teknologi.

Indikator Output

Indikator Output adalah adanya Kepedulian, Keterlibatan, Dukungan, dan Kesinambungan Output mengacu pada hasil yang diperoleh dari pelaksanaan advokasi (Ummah, 2019). Adapun strategi pelaksanaan dinas Lingkungan Hidup dalam advokasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagi berikut :

Pembentukan Bank Sampah

Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi pembentukan bank sampah di berbagai wilayah Kota Padang bank sampah menjadi pusat pengumpulan sampah anorganik yang memiliki nilai jual. Penyelesaian masalah sampah tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan petugas kebersihan saja masyarakat yang tergabung sebagai nasabah dapat menabung dari hasil sampah yang mereka kumpulkan tetapi masih banyak bank sampah yang kurang berkontribusi kedalam bank sampah tersebut (Maya, Haryono, & Kholisya, 2018).

Pengumpulan Sampah, nasabah menyetor sampah yang telah dipilah (organik dan anorganik). sampah anorganik, seperti plastik, kertas, logam, dan kaca, memiliki nilai jual dan dihitung sebagai tabungan.Sampah disortir lebih lanjut berdasarkan jenis dan kualitas. Sampah yang tidak bisa didaur ulang akan dibuang ke TPA Sampah yang memiliki nilai ekonomis dijual ke pengepul atau pabrik daur ulang. keuntungan dari penjualan ini dibagi untuk menutupi biaya operasional bank sampah dan menjadi saldo tabungan nasabah dapat mencairkan tabungan dalam bentuk uang tunai, membeli kebutuhan pokok, atau membayar keperluan lainnya sesuai dengan kebijakan bank sampah

Bahwa bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memungkinkan sampah dipilah, dikumpulkan, dan diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang menggunakan pembentukan bank sampah sebagai salah satu strategi utama dalam advokasi kebijakan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi advokasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

1. Faktor Penghambat

Adapun Faktor penghambat yang mempengaruhi advokasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Litbang Kabupaten Bandung, 2012)dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

a. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat

Faktor penghambat yang mempengaruhi advokasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat adalah pendekatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengelolaan sampah. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran (awareness) dan pengetahuan (knowledge) sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hal ini disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat proses advokasi dan komunikasi ini adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah Banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dasar atau kesadaran awal terkait pengelolaan sampah. Akibatnya, pesan edukasi sulit diterima atau dipahami sepenuhnya. Norma sosial atau kebiasaan masyarakat tertentu, seperti membuang sampah sembarangan, menjadi penghambat perubahan perilaku meskipun telah diberikan edukasi.

b. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas

Faktor penghambat mempengaruhi advokasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini mencakup segala bentuk hambatan yang berkaitan dengan kurangnya fasilitas dan sarana pendukung untuk mengelola sampah secara efektif.

Gambar 2 Kurangnya Kontainer Bank Sampah

maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat proses advokasi dan komunikasi ini adalah Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas mengacu pada kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan program pengelolaan sampah dengan baik. Infrastruktur mencakup tempat sampah terpilah, kendaraan pengangkut

sampah, pusat daur ulang, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan. Sementara itu, fasilitas mencakup akses masyarakat terhadap alat-alat pengelolaan sampah seperti komposter, wadah daur ulang, dan layanan kebersihan yang memadai. dari membuang sampah sembarangan. Banyak individu yang merasa bahwa membuang sampah saluran air adalah cara yang cepat dan mudah untuk mengatasi sampah rumah tangga mereka.

c. Anggaran Yang Terbatas

Anggaran yang terbatas dapat menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam menjalankan advokasi lingkungan, khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Media dan berbagai saluran komunikasi yang digunakan dalam program advokasi juga dapat menjadi penghambat jika tidak didukung oleh anggaran yang cukup

2. Faktor Pendukung

a. Perda Nomor 21 Tahun 2012

Sanksi yang diterapkan dalam Perda ini juga menjadi bagian dari faktor pendukung yang mempengaruhi advokasi dengan adanya aturan yang memberikan konsekuensi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, advokasi dapat lebih efektif dalam memberikan pemahaman bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama. Penerapan sanksi dapat dijadikan sebagai alat dalam advokasi untuk menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang ada. Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar aturan yang ditetapkan. Sanksi dalam Perda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan sampah, sehingga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik. Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Perda ini adalah sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga penghentian sementara kegiatan bagi individu atau badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dalam mengelola sampah dengan baik. Teguran diberikan sebagai peringatan awal agar masyarakat atau pelaku usaha segera memperbaiki cara mereka dalam membuang atau mengelola sampah.

b. Adanya Dukungan dari Masyarakat

Dukungan masyarakat sangat penting dalam proses advokasi pengelolaan sampah karena tanpa keterlibatan aktif masyarakat, upaya pengelolaan sampah yang efektif akan sulit

tercapai. dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan dari masyarakat, proses advokasi dan komunikasi dalam pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan mereka dalam melibatkan masyarakat langsung dalam kegiatan advokasi dan komunikasi akan membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, advokasi Dinas Lingkungan Hidup memberikan strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu advokasi kerjasama dan advokasi pengawasan,memperkuat kerja sama dengan komunitas lokal dan pihak swasta. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pengawasan rutin terhadap program yang telah dijalankan, dengan mengukur jumlah peserta sosialisasi, perubahan perilaku masyarakat, dan peningkatan jumlah bank sampah yang aktif.

Hasil yang didapatkan dari observasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah berupaya maksimal dalam melaksanakan advokasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, tantangan berupa rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat masih menjadi hambatan utama yang perlu terus diatasi dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Advokasi Dinas Lingkungan Hidup Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah

Penelitian ini merupakan penelitian observasi dengan wawancara, yang dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan awal penelitian dilakukan awal bulan oktober 2024 langkah awal peneliti dengan cara wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Wawancara ini dilakukan dengan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk memahami pelaksanaan advokasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya advokasi dan sosialisasi, namun partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.

Penelitian menunjukkan bahwa advokasi dinas lingkungan hidup Kota Padang masih adanya kendala dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama melalui program seperti bank sampah dan sosialisasi edukatif. Namun, ada beberapa kendala penting yang harus ditangani. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya dan tenaga penyuluh, pelaksanaan kegiatan belum merata di seluruh Kota Padang, dan kelangsungan program membutuhkan dukungan kebijakan dan komitmen yang lebih kuat. Salah satu tantangan utama dalam mencapai perubahan kebijakan atau sosial yang diinginkan adalah partisipasi yang rendah dalam advokasi. Jika masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran advokasi tidak berpartisipasi secara aktif, tujuan advokasi untuk mengubah kebijakan atau perilaku sosial dapat terhambat atau bahkan tidak mungkin dicapai.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Hadi, 2023)tentang "Keterlibatan Lsm WALHI Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah Di TPA Gampong Jawa). Hasil penelitian terlihat bahwa adanya keterlibatan LSM WALHI Aceh dalam mengadvokasikan permasalahan penanganan persampahan di Kota Banda Aceh khususnya di TPA gampong Jawa dengan melakukan advokasi secara langsung ke pemerintah yaitu turun lapangan dengan aksi-aksinya, melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik agar mengurangi sampah palstik dan advokasi melalui tulisan-tulisan ataupun artikel yang berkenaan dengan permasalahan lingkungan terutama yang berkaitan dengan sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Shahreza, Sarwoprasodjo, Arifin, & Hapsari, 2020) dalam jurnal penelitian komunikasi dengan judul penelitian "Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang Selatan". Hasil penelitian menggambarkan bahwa proses komunikasi lingkungan pada pengelolaan sampah di komunitas bank sampah antara pemangku kepentingan pendukungnya mempertemukan tiga kepentingan yaitu, pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup), pengepul, dan komunitas bank sampah.

Penelitian yang dilakukan (Rejeki, Santoso, & Hanani, 2021) dengan judul penelitian "Analisis Relasi/Hubungan Organisasi Non Pemerintahan Dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan". Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah mencakup relasi/hubungan yang melibatkan KPKL dalam aktivitas Pemerintah,relasi/hubungan KPKL dengan Pemerintah bersifat

cooperatif dimana hubungan ini saling menguntungkan, hubungan yang partnership dimana hubungan ini sangat partisipatif dalam rangka pembangunan hingga hubungan conflictif, mengambil jarak sehingga membatasi ruang gerak, relasi/hubungan KPKL sebagai mitra sejajar (pararell) Pemerintah. Sehingga penelitian ini penanganan masalah limbah batik dan sampah di Sungai Kota Pekalongan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan advokasi kebijakan lingkungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk membangun kesadaran, mengubah perilaku, dan menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Pelaksanaan Advokasi kebijakan lingkungan menggunakan berbagai strategi, di antaranya penyuluhan edukasi, pembentukan bank sampah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Pemanfaatan media sosial dan media massa. Faktor yang mempengaruhi advokasi kebijakan lingkungan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang Adapun faktor penghambat advokasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang sebagai berikut kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas, Anggaran yang Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Adeliani, Niken, et al. (2019). *Advokasi Penanganan Pembuangan Sampah Liar di Kelurahan Benda Baru.*.https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/5388/3601

Ajie Hanif Muzaqi, Tri Ambulanto. (2020) .*PEMETAAN ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MALANG*, Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negarahttps://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/1201/1124

Aryenti Aryenti. (2012).*Peran Pendamping Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 3*R *(Reduce, Reuse,Recycle) di Kota banjar* ,Jurnal Permukiman https://jurnalpermukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/109

Claudia, Clara Peggy. (2021). *STRATEGI KOMUNIKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN*. *Kinesik* 8.1 : 78-89. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/article/view/146

Hadi, Asraf Rahmatul. (2023).*Keterlibatan Lsm Walhi Dalam Advokasi Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah Di Tpa Gampong*

Jawa). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32432/

Harsya, Irfan, and ErnawatI ErnawatI.(2017) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Padang utara Kota Padang*. Diss. Riau University. https://www.neliti.com/journals/jom-fisip-unri

Lubis, Minda Sari, et al. (2019).Pkm penyuluhan penggunaan antibiotik kepada masyarakat Desa Tembung.*Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2019): 297-301. https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/246

Maya, Siska, Sugeng Haryono, and Umi Kholisya.(2017).*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Kelurahan Tanjung Barat. Proceeding of Community Development* 1: 157-161. https://doi.org/10.30874/comdev.2017.21

Muh, Zainal S. (2018). *Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial Dalam Program Pembanguan Bidang Kesehatan [Sebuah Tinjauan Teoritis]. Jurnal Perspektif Komunikasi* :1-3. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/3895

Mukhlis,Mukhlis.(2024).*Optimalisasi Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mengatasi Penanggulangan Darurat Sampah Tpa Regional Payakumbuh.Jurnal Kesehatan Tambusai*5.4:11964-11976. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/36121/2473

Rejeki, Suci, R. Slamet Santoso, and Retna Hanani.(2021).*ANALISIS RELASI/HUBUNGAN ORGANISASI NON PEMERINTAHAN DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN*. Journal of Public Policy and Management Review: 425- 435. https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31468

Rendra Setyadiharja. (2018).*Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang,* Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah,http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/jip

Sari, Devi Puspita, et al. (2023).*PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH (PENERAPAN DI KELURAHAN GEDUNG AIR BANDAR LAMPUNG*). https://begawi.feb.unila.ac.id/index.php/begawi/article/view/24

Shahreza, Mirza, et al. (2020) *Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang Selatan.Jurnal Penelitian Komunikasi* 23.2. https://doi.org/10.20422/jpk.v2i23.721

Yusuf, Muhammad Rizaldy. (2016).*Investigasi Advokasi Pengendalian Tembakau di Indonesia: Studi Kasus TCSC Jawa Timur.*" *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 5.2 : 439. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahie6b5f4d1e3full.pdf